

# PERAN A. HASJMY DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ACEH

Oleh:  
Syabuddin Gade<sup>1</sup>

## Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan dan mengungkap kembali bagaimana peranan A. Hasjmy dalam pembangunan pendidikan Aceh. Melalui pendekatan sejarah dan metode deskriptif analitik akan ditelusuri catatan-catatan sejarah tentang kiprah A. Hasjmy dalam pembangunan pendidikan Aceh, terutama pada masa ia menjabat sebagai Gubernur, Rektor IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry) dan Dekan Fakultas Dakwah, UIN Ar-Raniry, baik yang terdapat dalam sumber primer maupun sekunder. Hasil kajian ditemukan bahwa A. Hasjmy mempunyai peran yang besar dalam pembangunan pendidikan di Aceh, terutama dalam menggerakkan pembangunan “Kopelma Darussalam” (Kota Pelajar dan Mahasiswa Darussalam), “Perkampungan Pelajar” dan “Taman Pelajar pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, meskipun pada waktu itu belum merata ke seluruh Aceh.

**Kata kunci;** *Peranan, A. Hasjmy, Pembangunan, Pendidikan, Aceh*

## A. Pendahuluan

Apakah A. Hasjmy sebagai tokoh pendidikan Aceh? Jawabannya ya benar, ia bukan hanya dikenal sebagai sastrawan, politikus, sejarawan dan tokoh dakwah, tetapi juga salah seorang tokoh pendidikan Aceh era 1960-an.<sup>2</sup> Sebelumnya, banyak

---

<sup>1</sup> Dosen fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Email: [syabuddingade@yahoo.com](mailto:syabuddingade@yahoo.com)

<sup>2</sup>Sebagai seorang sastrawan, A. Hasjmy termasuk angkatan pujangga baru. Karya sastranya cukup banyak, baik puisi, roman ataupun novel. Sebagai seorang politikus, A. Hasjmy pernah menjabat Gubernur Aceh selama dua periode (1957-1961 dan 1961 s/d akhir Maret 1964), meskipun periode kedua sebelum habis masa jabatannya sudah dipindahkan ke Departemen Dalam Negeri. Ia salah seorang “negosiator” dalam penyelesaian masalah Darul Islam di Aceh. Bahkan, ia juga mempunyai karya tulis dalam bidang politik. Sebagai seorang ulama, A. Hasjmy pernah menjabat sebagai ketua MUI Provinsi Aceh hingga akhir hayatnya. Sebagai sejarawan, A. Hasjmy mempunyai banyak karya dalam bidang sejarah, terutama sejarah dan kebudayaan Islam di Aceh dan sejarah Islam klasik. Sebagai tokoh dakwah, A. Hasjmy bukan hanya penggagas Fakultas Dakwah pertama di lingkungan IAIN di seluruh Indonesia, tetapi juga seorang profesor dalam bidang ilmu dakwah. Bahkan, setahu penulis sampai hari ini di IAIN Ar-Raniry belum muncul seorangpun profesor ilmu dakwah, selain A. Hasjmy. A. Hasjmy juga termasuk salah seorang tokoh sentral dalam pengembangan

tokoh lain yang berusaha merubah nasib pendidikan Aceh menjadi lebih baik, antara lain; Tuanku Raja Keumala, Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap, Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan Tgk. Abdul Wahab Seulimum. Jika A. Hasjmy sebagai tokoh pendidikan Aceh pada masanya, maka apa perannya dalam dunia “persilatan”<sup>3</sup> pendidikan di Aceh? Menurut penulis peran A. Hasjmy sebagai tokoh pendidikan Aceh dapat dilihat dari dua sisi; *pertama*, perannya sebagai pemikir pendidikan. Sebagai pemikir pendidikan, ia berusaha memikirkan dan menawarkan ide-ide kependidikan secara ilmiah, antara lain mengenai pengertian pendidikan,<sup>4</sup> tujuan pendidikan,<sup>5</sup> perbedaan pengajaran agama dengan pendidikan agama,<sup>6</sup> kritik terhadap isu sekularisme pendidikan di Indonesia.<sup>7</sup>*Kedua*, sebagai penggerak pembangunan pendidikan di Aceh. Menimbang terbatasnya masa, maka pembahasan dalam makalah ini hanya dilihat dari sisi yang kedua saja.

Sebagai penggerak pembangunan pendidikan di Aceh, A. Hasjmy memiliki peran yang besar. Sejak tahun 1936/1937 A. Hasjmy muda sudah melibatkan diri dalam pembaharuan pendidikan di Aceh. Selain mengajar, kerjasama dengan Teungku Abdul Wahab, pimpinan Perguruan Islam Seulimum (PIS), dan beberapa kawannya alumni Madrasah Thawallib Padang Panjang terus dirajut secara baik untuk melakukan pembaharuan kurikulum PIS sehingga pada waktu itu PIS berjaya diperbaharui yang dibagi kepada dua tingkatan, yaitu *Ibtidaiyah* dan *Thanawiyah*. Kurikulumnya dibina hampir sama dengan kurikulum Madrasah Tawallib Padang Panjang dan Perguruan Muslim Bukit Tinggi.<sup>8</sup>

---

pendidikan di Aceh, terutama Kampus Darussalam, sehingga ia disebut-sebut sebagai “pahlawan” atau “Bapak pendidikan” di Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Rektor IAIN Ar-Raniry. Ia juga menulis dalam bidang ilmu pendidikan. A. Ghazaly, 1978, *Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy*, Jakarta: Socialia, hlm. 53 dan 87; Hasan Basri, Teungku A. Hasjmy: pengembang tradisi keilmuan dan perekat ulama-umara. Dlm. Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Ensiklopedi ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004, hlm. 491.

<sup>3</sup>Istilah “persilatan” di sini dimaksudkan bahwa pada waktu itu perjuangan untuk merubah nasib pendidikan Aceh menjadi lebih baik bukanlah perkara mudah, tetapi memerlukan “jurus-jurus” tertentu. Bahkan buruknya nasib pendidikan Aceh turut menyulut api pemberontakan DI-TII di Aceh.

<sup>4</sup> A. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978, hlm. 79

<sup>5</sup>Ibid., hlm. 53 dan 79; A. Hasjmy, *Konsepsi Ideal Darussalam*, dalam Komisi Redaksi, *10 Tahun Darussalam dan hari Pendidikan Provinsi Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Jajasan Darussalam, 1969, hlm. 67-73; A. Hasjmy, *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agressi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 63-65.

<sup>6</sup>A. Hasjmy, *Mengapa Umat Islam mempertahankan pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, hlm. 9-10.

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 14-15

<sup>8</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 53.

Begitu juga, ketika ia melanjutkan belajar ke Sumatera Barat dalam tahun 1938, cita-cita untuk membangun pusat pengembangan ilmu di Aceh semakin mengakar dalam batinnya. Kemudian cita citanya ini yakni keinginan untuk membangun institusi *Seulawah Jantan Institut* di Aceh ditulis dalam novelnya *Melalui jalan raya dunia*.<sup>9</sup> Akan tetapi, perhatian A. Hasjmy dalam bidang pendidikan secara lebih serius dan nyata dilakukan ketika ia sudah diangkat sebagai Gubernur Aceh dan masa-masa sesudahnya.

Perhatian A. Hasjmy dalam bidang pendidikan didasarkan pada keyakinannya bahwa menuntut ilmu merupakan suatu perintah Allah dan Rasul-Nya. Ia juga sadar bahwa kemunduran Aceh dalam segala bidang merupakan akibat dari pencerobohan dan perang yang hampir-hampir tiada henti. Dalam menghadapi kemunduran itu sekaligus sebagai langkah strategis mencapai kejayaan Aceh kembali, Aceh perlu dijadikan lagi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam.<sup>10</sup> Menurut A. Hasjmy, masyarakat Aceh akan memperoleh kejayaannya dengan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan hal itu tentu sangat berhajat kepada pembangunan pendidikan. Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini bersifat syumul dalam arti semua ilmu, tanpa membedakan apa yang sering dikatakan orang antara “ilmu agama Islam” dan “ilmu umum”. Sebab, dalam pandangan A. Hasjmy semua ilmu adalah ilmu Islam. Tambahan lagi, Islam tidak pernah mengakui bahwa ada ilmu yang bukan ilmu Islam. Semua ilmu diperlukan sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kecuali ilmu yang dengan nas pasti dinyatakan terlarang seperti ilmu sihir. Dalam Islam hanya ada pembidangan ilmu dan terserah kepada setiap orang untuk memilih bidang mana yang hendak dipelajari secara lebih mendalam sesuai dengan bakat yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Selain itu, hasil bacaan yang mendalam mengenai sejarah Aceh juga memberikan kesadaran pada A. Hasjmy bahwa kemajuan Aceh pada zaman keemasannya (Abad ke XVI) sebagai sebuah negara besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peranan pusat-pusat pendidikan seperti Zawiyah Cot Kala, Zawiyah Blang Pria, Universitas Baiturrahman dan lain-lainnya yang bertugas mendidik dan memproduksi ulama-ulama yang

---

<sup>9</sup> A. Hasjmy, *Melalui jalan raya dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978c, hlm. 125-129. Buku novel ini pertama kali diterbitkan oleh Indische Dukkerij, Medan pada tahun 1938.

<sup>10</sup> Anon. Memoar, *Tempo*, 26 Januari 1991, hlm. 66

<sup>11</sup> A. Hasjmy, *Konsepsi ideal Darussalam*. Dlm. Komisi Redaksi, 1969, hlm. 72.

menguasai bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan.<sup>12</sup>Perintah Allah dan Rasul-Nya tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan serta sejarah kemajuan Islam, terutamanya di Aceh dijadikan sebagai pendukung oleh A. Hasjmy untuk membuat perancangan dan memberikan perhatian penuh bagi pembangunan pendidikan di Aceh. Hal ini juga disokong oleh saran ulama, “konsepsi prinsipil bijaksana” dan kandungan “ikrar Lamteh” mengenai pembangunan Aceh dalam arti luas.

Perhatian A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh dalam bidang pendidikan bukan hanya pencetus idea pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh atau yang dinamakan “Konsepsi Pendidikan Darussalam”, tetapi juga secara aktif membuat perancangan, dan berupaya mewujudkan idea pembangunan pendidikan bersama-sama dengan para pemimpin Aceh lainnya dengan memohon sokongan dan bantuan dari berbagai pihak; ulama, tentara, pegawai kerajaan, pengusaha (orang kaya) dan semua lapisan masyarakat Aceh serta pemerintah pusat. Bagi A. Hasjmy pembangunan pendidikan secara menyeluruh bukan hanya dalam upaya meredam pemberontakan DI/TII Aceh sesuai dengan “ikrar Lamteh”, tetapi juga sebagai *usaha* untuk mencerdaskan masyarakat Aceh dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan, membina manusia yang bertaqwa kepada Allah, berjiwa besar, berpengetahuan luas dan berbudi luhur sehingga rakyat Aceh akan memperoleh kejayaannya kembali.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan idea pembangunan pendidikan secara menyeluruh tersebut, pada 1 Februari 1958 diadakanlah musyawarah penting di Aula PEPERDA. Musyawarah ini dihadiri oleh A. Hasjmy sebagai Gubernur, Syamaun Ghaharu sebagai PEPERDA (Penguasa Perang Daerah Aceh) dan tokoh-tokoh Aceh lainnya. Tujuan musyawarah ini selain untuk mengajak dan memperoleh kesamaan pandangan dan kebulatan tekad para pemimpin dalam pembangunan Aceh sesuai dengan situasi konflik yang sedang dihadapi, juga berupaya merumuskan haluan atau polisi (*policy*) pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh. Antara keputusan bulat yang dicapai dalam musyawarah ini adalah perlu dibangun dengan segera sebuah “pusat pendidikan” di ibu kota Daerah Istimewa Aceh, yang dinamakan “Kopelma Darussalam” (Kota Pelajar dan Mahasiswa Darussalam), kemudian di tiap-tiap Kabupaten (Negeri) dan Kecamatan

---

<sup>12</sup> Menurut A. Hasjmy, tanpa adanya pusat-pusat pendidikan yang bertugas mendidik dan memproduksi ulama-ulama yang menguasai bermacam cabang ilmu pengetahuan, Aceh tidak akan pernah mempunyai negara yang teratur, pemerintahan yang stabil, ekonomi dan keuangan yang kuat, angkatan perang yang gagah perkasa dan kebudayaan yang bernilai “langit” dan “bumi”, bahkan tidak akan pernah menjadi “Lima Besar Islam” (Lima Besar Kerajaan Islam) di abad XV (A. Hasjmy, 1985, hlm. 538).

(bagian negeri) di seluruh Aceh masing-masing akan dibangun “Perkampungan Pelajar” dan “Taman Pelajar”.<sup>13</sup> Inilah yang akan menjadi fokus pembahasan selanjutnya dalam mengungkap kiprah A. Hasjmy sebagai penggerak pembangunan pendidikan di Aceh.

#### **B. Peran A. Hasjmy dalam Pembangunan “Kopelma Darussalam”**

Untuk melaksanakan idea besar tersebut, dibentuklah badan-badan pelaksananya seperti YDKA (Yayasan Dana Kesejahteraan Aceh) dan KPKD (Komisi Pencipta Kopelma Darussalam). Perlu ditegaskan di sini, bahwa pada awal pembangunan “Kopelma Darussalam” kondisi Aceh masih dalam kondisi pemberontakan DI/TII Aceh sehingga pada waktu itu di Aceh ada dua penguasa, yaitu PEPERDA dan Gubernur Aceh. Khusus YDKA dibentuk oleh Syamaun Ghaharu sebagai Penguasa Perang Daerah Aceh (PEPERDA) pada 26 March 1958 yang pusatnya di Banda Aceh di bawah pimpinan Muhammad Husin. YDKA ini bergerak untuk mencari dana pembangunan Aceh sehingga YDKA mempunyai cabang di tiap-tiap Kabupaten, Kecamatan di Aceh dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu. Tugas utamanya adalah mencari dana untuk segala bidang kesejahteraan (pendidikan, agama, kesehatan, sosial dan sebagainya), tetapi untuk tahap pertama diutamakan bagi pembangunan pendidikan, khususnya pembangunan “Kopelma Darussalam”.<sup>14</sup>

Adapun KPKD yang dibentuk pada 9 Jun 1958 dipimpin langsung oleh A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh. KPKD ini mempunyai orientasi yang sama dengan YDKA dalam upaya membangun pendidikan Aceh secara menyeluruh. Tugas utama KPKD antaranya adalah; a. merencanakan idea (membuat plan) bagaimana seharusnya bentuk, isi (kandungan), jiwa dan semangat pembangunan “Kopelma Darussalam”, melengkapi kreasi yang megah dan agung tentang pembangunan yang modern (modern) secara arsitektur (bernilai seni) dan historis (sejarah); b. Memberi penerangan kepada rakyat guna kelancaran pelaksanaan pembangunan Darussalam; c. Menggali dokumen-dokumen sejarah Aceh.

Sebagai Gubernur dan pimpinan KPKDA. Hasjmy sering mengadakan diskusi atau musyawarah bukan hanya untuk menciptakan idea, sistem, jenis

---

<sup>13</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 71.

<sup>14</sup> Untuk memperkuat masalah dana, Syamaun Ghaharu sebagai Peperda, juga mengambil langkah jitu, yaitu melakukan “perdagangan barter” antara Aceh dengan Singapura dan Pulau Pinang. Keuntungannya diperutukkan bagi pembangunan “Kopelma Darussalam” (A. Hasjmy, 1985, hlm. 541).

sekolah, tahapan pembangunan, program pengembangan, pemberian nama kampus dan institusi perguruan tinggi sesuai dengan sejarah Aceh, tetapi juga mengatur strategi bagaimana mengajak rakyat Aceh dan di luar Aceh supaya memberikan sokongan penuh dalam pembangunan “Kopelma Darussalam”, “Perkampungan Pelajar” dan “Taman Pelajar”. Sebab, adanya sokongan rakyat dan semua pihak merupakan modal utama dalam perwujudan pembangunan ini. Kesadaran akan perlunya sokongan rakyat, maka A. Hasjmy pun menugaskan seluruh anggotanya untuk melakukan penerangan kepada segenap lapisan masyarakat, dengan mempergunakan semua sarana yang ada. Antaranya melalui musyawarah umum, ceramah-ceramah, RRI (Radio Republik Indonesia) Banda Aceh, sekolah-sekolah, di tempat-tempat upacara dan di pelbagai kesempatan. Bahkan dalam perjalanan selanjutnya lagu “Mars Darussalam” dan lagu “Hari Pendidikan” ciptaan T. Djohan, Chalid Ibrahim, P. Harahap, Anzib dan T. Rajeuk, diminta supaya dinyanyikan di sekolah-sekolah, tempat upacara atau di pelbagai kesempatan di pelosok Aceh. Semua ini diperlukan untuk mengajak masyarakat sekaligus membangkitkan jiwa, semangat dan ghairah kerja mereka dalam pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh.<sup>15</sup>

Selepas mengadakan persiapan-persiapan seperlunya, termasuk penetapan lokasi pembangunan “Kopelma Darussalam”, pembuatan plan lokasi memperoleh persetujuan Biro Planologi Jakarta sambil membangkitkan semangat rakyat, maka pada 17 Agustus 1958 dilakukanlah peletakan batu pertama pembangunan tugu “Kopelma Darussalam” oleh Menteri Agama Mohd Ilyas atas nama Pemerintah Pusat yang sengaja dijemput hadir oleh A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh. Tiga hari kemudian (pada 22 Agustus 1958) dibentuk juga Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Ekonomi (P3FE) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.I/S/Atjeh/1958 sebagai fakultas pertama di “Kopelma Darussalam”. Pada tarikh 24 Agustus 1958 dilakukan juga peletakan batu pertama pembangunan gedung pertama oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prijono.<sup>16</sup>

Pembangunan gedung Fakultas Ekonomi (FE) tersebut semakin memperkukuh semangat masyarakat Aceh sehingga secara keseluruhan mereka pun memberikan tanggapan yang luar biasa. Sumbangan dana pembangunan bukan hanya diberikan oleh kaum hartawan, tetapi juga oleh rakyat umum. Bahkan tentara, polis, pegawai kerajaan,

---

<sup>15</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 92-93 dan 101-104.

<sup>16</sup> Marzuki Nyak Man, Suka duka pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Komisi Redaksi, 1969, hlm. 54.

pelajar dan rakyat Aceh pada umumnya datang berbondong-bondong ke “Kopelma Darussalam” untuk bergotong royong membuat jalan, meratakan tanah, dan sebagainya.<sup>17</sup> Ainal Mardhiah Ali, seorang tokoh wanita yang aktif dalam pembangunan “Kopelma Darussalam” mengatakan seperti berikut;

Setiap kali saya datang ke kampus (Kopelma Darussalam), sering saya terharu menyaksikan rakyat yang datang dari berbagai pelosok dengan truk tua (truk lama) memikul cangkul, skrup dan parang. Mereka tak peduli hujan, badai, dan panas. Keringat bercucuran di tubuhnya. Sesungguhnya ini, benar-benar sebuah pekerjaan yang tulus ikhlas berdasarkan kepercayaan mereka kepada pencetus idea (A. Hasjmy) yang ikhlas pula. Saya berani bertaruh, tanpa kharismatik seorang pemimpin tak mungkin rakyat mengorbankan segala tenaganya.<sup>18</sup>

Selain itu, di luar Aceh seperti di Medan, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta, juga dibentuk BAPA (Biro Asistensi Provinsi Aceh)<sup>19</sup> oleh A. Hasjmy. BAPA ini dipimpin langsung oleh pemuda-pemuda Aceh yang sedang belajar di kota-kota tersebut. Tugas utama BAPA adalah mencari dan mengajak tenaga pengajar (pensyarah atau guru) supaya bersedia mengajar di Aceh sekaligus mengurus pengangkatannya sebagai pegawai kerajaan di Departemen Pendidikan atau di Departemen Agama. Pemerintah Daerah Aceh (Gubernur) akan memberikan biaya perjalanan ke Aceh (kalau pihak Departemen Pendidikan atau Departemen Agama tidak mempunyai biaya untuk itu). Dengan cara ini tenaga pengajar dapat diperoleh secara bertahap.<sup>20</sup> Akhirnya, pada 2 September 1959 diadakanlah acara peresmian “Kopelma Darussalam” yang ditandai dengan pembukaan selubung tugu “Kopelma Darussalam” sekaligus peresmian Fakultas Ekonomi sebagai fakultas pertama yang dibangun di “Kopelma Darussalam” yang kemudian menjadi fakultas pertama dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah).<sup>21</sup> Peresmian ini dilakukan oleh Presiden Soekarno yang dihadiri oleh para pemimpin, tokoh,

---

<sup>17</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 541.

<sup>18</sup> Ainal Mardhiah Ali, Prof. Ali Hasjmy, Bapak untuk semua. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 240.

<sup>19</sup> A. Muin Umar, Prof. Ali Hasjmy yang kukenang. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 322.

<sup>20</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 542.

<sup>21</sup> Pimpinan (Dekan) Fakultas Ekonomi sejak peresmiannya pada 2 September 1959 hingga akhir tahun 1962 dijabat oleh Teuku Iskandar. Fakultas Ekonomi ini pada awalnya secara administratif merupakan cabang USU Medan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 3328/S tarikh 12 Januari 1959 (Komisi Redaksi, 1969, hlm. 161).

ulama dan masyarakat Aceh serta para menteri dan duta besar negara-negara sahabat.

Dalam acara peresmian “Kopelma Darussalam” tersebut A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh dan Ketua KPKD mengungkapkan kembali sejarah dan cita-cita pembangunan “Kopelma Darussalam” dengan harapan akan memperoleh sokongan penuh dari pihak pemerintah. Antara ucapannya itu seperti berikut;

Kami yakin seyakin-yakinnya bahwa kemajuan Aceh di zaman gemilangnya, bukanlah semata-mata karena angkatan perangnya yang kuat dengan rakyatnya yang gagah berani dan bukan pula lantaran (karena) Kerajaan (Kerajaan Aceh Darussalam) dengan pemerintahannya yang teratur, tetapi di samping itu yang terutama sekali ialah karena Aceh ketika itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan para sarjananya yang terkenal (masyhur) ke berbagai benua. Kerajaan dengan ilmu pengetahuan kala itu berbimbangan tangan dengan seteguh-teguhnya, seperti dilambangkan oleh kalimat-kalimat yang menjadi semboyan di masa itu, dan yang kita pergunakan untuk semboyan “Darussalam” di masa ini, yakni; *Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala*.<sup>22</sup> Didorong (didukung) oleh rasa kesadaran yang demikian, kesadaran yang hendak menjadikan Aceh kembali jaya dan berbahagia sebagai suatu bagian yang penting dari Negara Republik Indonesia, maka diusahakanlah membangun “Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam” ini, yang diharapkan kelak di kemudian hari akan menjadi mata air ilmu pengetahuan, yang dapat mendarmabaktikan kepada bangsa dan negara serta dapat menjelma jadi cermin dari Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.<sup>23</sup>

Presiden Soekarno pun menyambut baik upaya pembangunan “Kopelma Darussalam”. Dalam peresmian itu selain membuka kain selubung dan menulis ungkapan “tekad bulat melahirkan perbuatan nyata Darussalam menuju kepada pelaksanaan cita-cita” di atas batu pualam, Presiden Soekarno juga menyampaikan alu-aluan sebagai sokongan dan harapan bagi “Kopelma Darussalam” dalam mewujudkan cita-cita rakyat Aceh. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataannya seperti berikut;

Dengan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa saya menyatakan, bahwa (bahwa) pada tanggal (tarikh) 28 Safar 1379 (2 September 1959) telah dibuka dengan resmi di Banda Aceh; Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam Pusat Pendidikan di Daerah Aceh sebagai lambang iklim damai dan suasana persatuan dan kesatuan, sebagai hasil kerjasama antara rakyat dan para pemimpin Aceh,

---

<sup>22</sup> Ungkapan pepatah Aceh ini akan dijelaskan kemudian dalam pembahasan mengenai pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam menghadapi masalah budaya Aceh.

<sup>23</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm.107.

sebagai modal pembangunan dan kemajuan bagi Daerah Aceh khususnya dan seluruh Indonesia umumnya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam ini, agar tercapai cita-cita putra Aceh untuk membawa masyarakat Aceh kepada kemajuan dan menyiapkan putra Aceh menjadi pendukung dan pencipta kejayaan Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Sebulan selepas acara peresmian tersebut ditetapkan dan diistiharkan juga oleh A. Hasjmy bahwa 2 September merupakan "Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh" (Hardikda) sesuai dengan SK Gubernur Aceh tanggal 5 Oktober 1960 No. 90/1960. Hardikda ini kemudian dirayakan setiap tahunnya di seluruh Aceh.<sup>25</sup> Namun, semua itu bukan bermakna usaha pembangunan "Kopelma Darussalam" sudah selesai, terutamanya pembangunan institusi pengajian tinggi. A. Hasjmy, Syamaun Ghaharu dan para tokoh Aceh lainnya terus bekerja keras bagi pembangunan "Kopelma Darussalam" sebagai pusat pendidikan di Aceh, terutamanya lagi sebagai pusat pendidikan tinggi seperti Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), IAIN Ar-Raniry, Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu dan Akademi pemerintahan Dalam Negeri. Untuk melengkapi pengalaman dakwah A. Hasjmy dalam pembangunan "Kopelma Darussalam", maka di sini akan diungkapkan juga peranannya dalam pembangunan masing-masing institusi pengajian tinggi ini sebagaimana uraian berikut:

i). Pembangunan Universitas Syiah Kuala

Peranan A. Hasjmy dan Syamaun Ghaharu, tanpa menafikan tokoh-tokoh Aceh lainnya dan masyarakat pada umumnya, dalam pembangunan "Kopelma Darussalam" boleh dipandang cukup besar sama ada dalam arti pembangunan fizikal maupun pentadbiran sebagai wujud pengiktirafan dari pihak kerajaan. Pada waktu peresmian "Kopelma Darussalam", fakultas yang sudah dibangun hanyalah "Fakultas Ekonomi" (FE). Pembangunan "FE" sebagai fakultas pertama di "Kopelma Darussalam" yang didasarkan atas pertimbangan sejarah bahwa rakyat Aceh suka berdagang belumlah cukup untuk diiktiraf sebagai sebuah universitas. Sebab, pada waktu itu untuk diiktiraf sebagai suatu universitas sekurang-kurangnya mesti ada tiga fakultas.

---

<sup>24</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 543 dan 549.

<sup>25</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 108.

Selanjutnya, pembangunan “Kopelma Darussalam” terus dikembangkan oleh A. Hasjmy sama ada sebagai Gubernur Aceh, Ketua Pengurus KPKD atau Ketua Umum Pengurus YDKA dalam stail baru<sup>26</sup> dan Syamaun Ghaharu (PEPERDA) beserta seluruh anggota dan rakyatnya. Dalam upaya mewujudkan Unsyiah sebagai bagian dari pembangunan “Kopelma Darussalam”, maka pada 9 Januari 1960 berdasarkan hasil musyawarah dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan (P3FKHIP). Dengan terbentuknya P3FKHIP ini, Syamaun Ghaharu (Ketua Umum) dan A. Hasjmy (Wakil Ketua Umum) yang dibantu anggotanya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Menteri PK (Pendidikan dan Kebudayaan) di Jakarta. Menteri pun mengirim “Komisi Teknis” ke Banda Aceh untuk meninjau pelbagai persiapan bagi pendirian FKHIP (Fakultas Kedokteran Hewan dan Ilmu Peternakan). Hasilnya, pada 17 September 1960 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PK No. 79966/UU berdirilah FKHIP yang kemudian pada 17 Oktober 1960 diresmikan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Sugiono Djuned Puspongoro, atas nama Menteri PK.<sup>27</sup> Pada waktu ini, FKHIP sudah dirubah namanya menjadi FKH (Fakultas Kedokteran Hewan) di lingkungan Unsyiah.

Pada 27 Oktober 1960, Teuku Iskandar (Dekan Fakultas Ekonomi dan salah seorang anggota seksi perencanaan KPKD pimpinan A. Hasjmy) bersama kawan-kawannya (Jahya Zamzami, Suardi, A. Sadik dan Ibrahim Husin) mengadakan suatu musyawarah di rumahnya. Dalam musyawarah ini mereka mengambil keputusan untuk menumbuhkan sebuah fakultas hukum swasta yang diberi nama

---

<sup>26</sup>Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh Komisi Pencipta Pencipta Kota Pelajar/Mahasiswa Darussalam tanggal 10 Agustus 1960 No. 2/II/KPTS/KPKD/60, organisasi KPKD diperbaharui. Pembaharuan ini dilakukan selepas memperhatikan bahwa pembangunan *Kopelma Darussalam* semakin meluas serta bidang usaha dan tugas KPKD semakin banyak. Namun, Gubernur Aceh A. Hasjmy tetap sebagai Ketua KPKD. Atas pertimbangan bahwa untuk kelancaran, kesempurnaan dan ketertiban jalannya usaha yang lebih besar dalam melaksanakan plan *Tri Karya Bhakti* yang meliputi usaha pengisian otonomi yang seluas-luasnya dan pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam segala bidang, maka pada 3 September 1960 diadakan reorganisasi dan penggabungan antara YDKA dan KPKD sehingga dibentuklah YDKA dalam stail baru, di mana A. Hasjmy bertindak sebagai Ketua Umum Badan Pengurus YDKA manakala Syamun Ghaharu (PEPERDA) bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas YDKA. Pada 26 September 1960 diadakan pula acara timbang terima antara Ketua YDKA lama (Muhammad Husin) dengan Ketua Umum YDKA baru (A. Hasjmy) (Komisi Redaksi, 1969, hlm. 94-95).

<sup>27</sup>Tetapi FKHIP ini pada awal penumbuhannya masih cabang dari USU (Universitas Sumatera Utara) Medan. Setahun kemudian, setelah peresmian “Universitas Syiah Kuala” (Unsyiah), pada 30 Desember 1961 FKHIP ditimbang terima ke dalam persekitaran “Unsyiah” (Komisi Redaksi, 1969, hlm. 175).

“Perguruan Tinggi Rakyat Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat” (PTRIHPM). Selepas menyusun kurikulum dan tenaga pengajar, mereka merencanakan belajar pertamanya akan diadakan pada bulan November 1960. PTRIHPM dalam status swasta hanya berlangsung kurang lebih enam bulan. Sebab, atas ajakan A. Hasjmy, pimpinan PTRIHPM dalam musyawarah pada bulan Mei 1961 menyetujui bahwa PTRIHPM akan diusulkan supaya diiktiraf sebagai fakultas hukum negeri. Akhirnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP No. 10/1961 tanggal 20 Jun 1961, maka terhitung 1 Julai 1961 PTRIHPM diiktiraf menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Negeri (FHPMN).<sup>28</sup>Pada waktu ini, FHPMN sudah dirubah namanya menjadi Fakultas Hukum di Unsyiah.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan pembangunan PTRIHPM, atas usulan Gubernur Aceh (A. Hasjmy) dan PEPERDA (Syamaun Ghaharu), dikeluarkan juga SK Menteri PK tanggal 17 November 1960 No. 96450/UU mengenai Panitia Persiapan Unsyiah dan FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Panitia ini pun, pada 17 Desember 1960 mengadakan musyawarah pertama yang dipimpin A. Hasjmy sebagai Ketua Umum yang dihadiri oleh Kolonel M. Yasin (Wakil Ketua Umum), Syamaun Ghaharu (Penasihat Panitia), Marzuki Nyak Man (Setia usaha Panitia) dan seluruh anggotanya. Dalam musyawarah ini, A. Hasjmy menyampaikan nasihatnya “supaya seluruh anggota panitia bekerja keras dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas sehingga cita-cita rakyat Aceh untuk mewujudkan universitas di Aceh benar-benar dalam waktu dekat menjadi kenyataan”.<sup>29</sup>Ia juga meminta Kolonel M. Yasin untuk melakukan pembicaraan dengan instansi-instansi yang dianggap perlu di Jakarta guna mempercepat terwujudnya Unsyiah. Manakala kepada setia usahanya, Marzuki Nyak Man yang juga sebagai Wakil Gubernur Aceh pada waktu itu diminta untuk mengirim surat kepada pimpinan UGM (Universitas Gajah Mada) di Yogyakarta dengan harapan pihak UGM mau memberikan sokongan bagi perwujudan Unsyiah, terutamanya sokongan moral dan pengiriman tenaga pengajar (pensyarah).

Pada 13 Februari 1961 panitia mengadakan lagi musyawarah di pejabat DPRD-GR Daerah Istimewa Aceh. Dalam musyawarah ini M. Yasin menjelaskan bahwa kondisi Aceh pada waktu itu lebih banyak memerlukan perhatian pada pembangunan fisik, misalnya perbaikan jalan-jalan, pelabuhan dan sebagainya yang dihajati oleh masyarakat dalam waktu dekat. Oleh itu, menurut M. Yasin, mendirikan

---

<sup>28</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 184-185.

<sup>29</sup> Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 78-79.

universitas bukanlah suatu perkara yang mendesak apalagi pembangunan suatu universitas diperlukan biaya yang cukup besar, persiapan yang matang, tenaga pengajar yang cukup di mana semua itu belum ada. Penjelasan M. Yasin ini menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan peserta mesyuarat. Ada pihak yang setuju pembukaan universitas ditunda saja, ada juga pihak yang berpendapat universitas perlu segera diwujudkan. Akhirnya, musyawarah ditutup dengan penuh kelesuan di mana satu-satunya keputusan yang dicapai ialah dua hari lagi akan diadakan lagi musyawarah di rumah M. Yasin.<sup>30</sup>

A. Hasjmy tampaknya tidak merasa lega dengan hasil musyawarah ini. Marzuki Nyak Man pun dipanggil dan kepadanya diungkapkan suatu ungkapan yang penuh harapan; "saudara Marzuki, saudara telah mengikuti dan mendengar pembicaraan dalam rapat panitia tadi, terserahlah sekarang (kini) kepada saudara-saudara sarjana Aceh, apakah Universitas Syiah Kuala tersebut jadi lahir atau tidak".<sup>31</sup> Dengan ungkapan ini, Marzuki Nyak Man, T. Iskandar dan kawan-kawannya diharapkan supaya mereka untuk bekerja lebih keras lagi sehingga pembangunan universitas dapat diwujudkan secepatnya. Sebab, meskipun A. Hasjmy sadar bahwa membangun sebuah universitas bukan perkara mudah, namun ia mempunyai suatu prinsip perjuangan sebagai berikut;

Jangan takut untuk memulai sesuatu karena khawatir akan gagal. Kegagalan sebenarnya adalah ketika kita takut melaksanakan gagasan-gagasan, padahal sebenarnya gagasan itu sangat menjadi dambaan masyarakat. Kalau suatu gagasan dapat membawa manfaat untuk masyarakat, biasanya banyak orang akan membantu, dan oleh sebab itu akan ada saja orang lain yang akan meneruskan gagasan tersebut. Yang penting mulai dan laksanakan!<sup>32</sup>

Dalam suasana harap-harap cemas, selepas musyawarah tiba-tiba seorang penolong pejabat Gubernur mengantarkan sepucuk surat dari Presiden (Rektor) UGM kepada PPU (Panitia Persiapan Unsyiah). Surat yang tanggal 14 Januari 1961 No. 28/Sn/I/61 itu merupakan kesediaan pihak UGM untuk membantu pengembangan Unsyiah. Surat ini, atas saran A. Hasjmy kemudian dibacakan dalam musyawarah lanjutan pada 15 Februari 1961 di rumah M. Yasin. Sembari mendengar kandungan surat itu semua anggota musyawarah pun terdiam. M. Yasin yang dalam musyawarah sebelumnya ingin menunda

---

<sup>30</sup> Marzuki Nyak Man, Suka duka pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Komisi Redaksi, 1969, hlm. 57.

<sup>31</sup> Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm.79.

<sup>32</sup> Nurdin Abdurrahman, A. Hasjmy salah seorang peletak dasar era modern Aceh Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 100.

pembukaan Unsyiah kemudian dengan tegas mengatakan “Kalau begitu, kita dihadapkan kepada pembukaan Universitas Syiah Kuala. Namun demikian, saya minta supaya kita bekerja keras dan nanti pada bulan Juni yang akan datang hendaknya semua persiapan benar-benar sudah rampung (selesai). Pada waktu itulah kita menentukan pembukaan Universitas Syiah Kuala”. Pandangan M. Yasin ini kemudian dijadikan sebagai keputusan dalam musyawarah itu.

Sebagai usaha mewujudkan keputusan musyawarah tersebut, A. Hasjmy mengutus beberapa orang utusan antaranya Marzuki Nyak Man, T. Iskandar, RM. Sudjono dan A.K. Abdullah untuk menjalin kerjasama dengan pihak USU, UI (Universitas Indonesia), UNPAD (Universitas Padjajaran) dan UGM, terutama mengenai pensyarah. Kesepakatan yang dicapai ialah semua pihak berjanji akan memberikan sokongan penuh bagi pembangunan Unsyiah dan akan diutus pensyarah sesuai keperluan Unsyiah. Para utusan tersebut juga ditugaskan untuk menyampaikan pelbagai persiapan pembukaan Unsyiah kepada Menteri Pendidikan.<sup>33</sup> Tugas ini pun berjaya di mana dalam waktu yang hampir bersamaan pihak kementerian mengeluarkan dua SK yaitu SK Menteri PTIP No. 9/1961 tanggal 27 Juni 1961 mengenai FKIP dan SK Menteri PTIP No. 11/ 1961 tanggal 21 Jun 1961 yang berlaku pada 1 Juli 1961 mengenai Unsyiah. Namun, hari jadi Unsyiah dalam SK No. 11 itu ditetapkan pada 2 September, karena pada 2 September 1959 sudah diresmikan Fakultas Ekonomi (FE) sebagai fakultas pertama di Unsyiah. Dengan kejayaan ini di Unsyiah sudah ada empat fakultas (FE, FKHIP, FHPMN dan FKIP) dan pada 27 April 1962 diresmikan oleh Presiden Soekarno dalam suatu upacara resmi yang dihadiri oleh segenap lapisan masyarakat Aceh, para menteri, duta besar dan sebagainya.<sup>34</sup>

Selepas peresmian Unsyiah, tugas dakwah A. Hasjmy dalam pembangunan Unsyiah belum selesai. Ketika ia dipilih untuk memimpin Dewan Kurator (Penyantun) Unsyiah sesuai dengan SK Menteri PTIP No. 143 tahun 1962 yang kemudian disempurnakan dengan SK Menteri PTIP No. 28 tahun 1963 dan No. 42 tahun 1963 kepadanya ditugaskan menjaga dan memelihara hubungan baik antara masyarakat, jawatan pemerintahan dengan Unsyiah serta membantu Unsyiah dalam mengatasi berbagai cabaran. Selain itu, A. Hasjmy juga dipilih sebagai anggota Panitia Pembangunan “Fakultas Teknik” (Fakultas Jurutera) Unsyiah sesuai dengan SK Pemangku Rektor Unsyiah, M. Yasin, No.Sekr./USK/16/63 tanggal 31 Mei 1963. Hal ini berlaku hingga ia dipindah tugas ke Jakarta (1964-

---

<sup>33</sup> Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Kopelma Darussalam Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 59

<sup>34</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 124 dan 193; Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 60.

1966). Namun, ketika ia kembali ke Aceh pada akhir Agustus 1966<sup>35</sup> tugas sebagai Ketua Penyantun Unsyiah mengikut SK Dirjen Perguruan Tinggi No. 56/1968 tanggal 23 Jun 1968 diserahkan lagi kepadanya.

ii). Pembangunan IAIN Ar-Raniry

Peran A. Hasjmy dalam pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang merupakan Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan “Kopelma Darussalam” Banda Aceh mempunyai sejarah tersendiri. Ide pembangunan IAIN Ar-Raniry, sudah pernah diimpikan A. Hasjmy sejak tahun 1938 dalam novelnya *Melalui Jalan Raya Dunia*, di mana ia bercita-cita hendak membangun sebuah pusat pengembangan ilmu di Aceh dengan nama “Seulawah Jantan Institut”<sup>36</sup> yang di dalamnya akan diajarkan bukan hanya “ilmu-ilmu agama” tetapi juga “ilmu-ilmu umum”. Selain itu, dalam “Konsepsi Pemulihan Keamanan di Aceh” hasil musyawarah ulama Aceh pada 8 Februari 1957 di Pejabat Mahkamah Syar’iyyah Daerah Aceh juga disarankan kepada A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh untuk membangun sebuah “Universitas Islam”, di samping memperbanyak pembangunan sekolah dan menjadikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran penting di pelbagai sekolah dasar dan sekolah lanjutan.<sup>37</sup> Bahkan menurut pengakuan A. Hasjmy sendiri sebagaimana dikutip Soufyan Hamzah, bahwa sebelum perang dunia kedua, PUSA yang dipimpin Teungku Muhammad Daud Beureueh sudah merencanakan untuk membangun sebuah “Universitas Islam” di Aceh, namun belum terlaksana karena meletusnya perang dunia kedua.<sup>38</sup> Oleh itu, ide pembangunan “Seulawah Jantan Institut” atau “Universitas Islam” yang kemudian menjelma menjadi IAIN Ar-Raniry, merupakan akumulasi ide A. Hasjmy dengan pelbagai tokoh dan ulama Aceh lainnya yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi masa hadapan rakyat Aceh sekaligus meredam konflik DI/TII yang sedang berlaku pada waktu itu.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pada 2 September 1959 selepas peresmian “Kopelma Darussalam”, malamnya A. Hasjmy atas nama rakyat Aceh memohon kepada Presiden Soekarno agar di Aceh dapat dibangun satu “Universitas Islam Negeri” atau sekurang-kurangnya “Fakultas Agama Islam

---

<sup>35</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 666.

<sup>36</sup> A. Hasjmy, 1978c, hlm. 125-129.

<sup>37</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 532.

<sup>38</sup> Soufyan Hamzah, Telah bersatu dengan Masjid Raya Baiturrahman. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 156.

Negeri" (FAIN) penuh, bukan akademi.<sup>39</sup> Permohonan itu disampaikan oleh A. Hasjmy dengan mengajukan alasan bahwa hal itu merupakan plan ulama PUSA yang masih tertunda<sup>40</sup> dan jika hal itu dapat diwujudkan akan memberikan manfaat yang besar untuk meredam pemberontakan DI/TII dan lebih berjaya berbanding pengiriman tentera sampai 10 division ke Aceh.<sup>41</sup>Permohonannya yang disertai dengan alasan rasional itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno sehingga pada malam itu A. Hasjmy diminta untuk mendiskusikan permohonannya itu dengan Menteri PK (Priyono) dan Menteri Agama (Wahib Wahab). Hasil diskusi ini dicapailah persetujuan prinsip bahwa di Aceh yakni di "Kopelma Darussalam" akan dibangun Fakultas Agama Islam Negeri (FAIN), meskipun antara kedua menteri tersebut belum ada kesepakatan apakah FAIN Aceh itu akan ditetapkan di bawah pentadbiran Departemen PK atau Departemen Agama.<sup>42</sup> Persetujuan tersebut kemudian diperjuangkan lagi oleh A. Hasjmy sehingga dikeluarkanlah SK Menteri Agama (SKMA) No.48/1959 tanggal 1 November 1959<sup>43</sup> mengenai Panitia Persiapan Pembangunan Fakultas Agama Islam Negeri (P3FAIN). Panitia ini yang dipimpin oleh Syamaun Ghaharu (PEPERDA) dan A. Hasjmy (Gubernur Aceh) berjaya menubuhkan "Fakultas Syari'ah" (FSY) di Banda Aceh sebagai cawangan IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Yogyakarta sesuai dengan SKMA tanggal 12 Agustus 1960, No. 40/1960 di bawah pentadbiran Departemen Agama.<sup>44</sup> Pada tahun 1960 dibentuk lagi Panitia Persiapan Pembangunan Fakultas Tarbiyah (P3FT)

---

<sup>39</sup>A. Hasjmy, Peranan Departemen Agama dalam pembinaan manusia pancasila. Dlm. Panitia hari Jadi ke X Jami'ah Ar-Raniry, *10 Tahun IAIN Jami'ah Ar-Raniry*, Banda Aceh: t.p, 1973b, hlm. 48-49; A. Hasjmy, IAIN Jami'ah Ar-Raniry wujud sebuah cita-cita umat. Dlm. Ramly Maha et al., *15 tahun IAIN Jami'ah Ar-Raniry*, Banda Aceh: Panitia Hari Jadi ke XV IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1978, hlm. 14-15.

<sup>40</sup>Soufyan Hamzah, Telah bersatu dengan Masjid Raya Baiturrahman. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., 1994, hlm. 156.

<sup>41</sup> A. Hasjmy, 1979, hlm. 34.

<sup>42</sup> A. Hasjmy, IAIN Jami'ah Ar-Raniry. Dlm. Ramly Maha et al. 1978, hlm. 14.

<sup>43</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 228. Menurut sumber yang lain disebutkan bahwa SKMA tersebut adalah No.48/1959 tanggal September 1959 (A. Hasjmy, 1979, hlm. 34-35).

<sup>44</sup> Pada awal peresmiannya, *Fakultas Syariah* mempunyai tiga jabatan, yaitu; Tafsir, Hadith, Fiqh (Ilmu Hukum Islam) dan Qada' (Peradilan). Kini *Fakultas Syari'ah* mempunyai empat jabatan dimana masing-masing jabatan mempunyai dua atau tiga program belajar, iatu Jabatan *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*; Program Hukum Keluarga Islam dan Program Peradilan Islam dan Kepeniteraan, Jabatan *Jinayah wa Siyasah*; Program Hukum Pidana Islam dan Program Hukum Tata Negara Islam, Jabatan *Mu'amalah wa Iqtisad*; Program Manajemen Islam, Program Perbankan Islam dan Program Sistem Perdagangan Islam, Jabatan Perbandingan Mazhab dan Hukum; Program Fiqh dan Perundangan dan Program Fiqh Modern. Tim Revisi Buku Panduan Program (TRBPB) S-1 dan D3 IAIN Ar-Raniry, *Panduan Program S1 dan D3 IAIN Ar-Raniry tahun akademik 2004-2005*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004/2005, hlm. 62-92.

cawangan Kutaraja (kini Banda Aceh) sesuai dengan SKMA No.30 tahun 1960. Panitia ini yang dipimpin A. Hasjmy terus melakukan pelbagai persiapan antaranya pembangunan “Sekolah Persiapan” (SP) bagi calon-calon mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah (FT) atau fakultas agama lainnya yang akan dibuka di “Kopelma Darussalam”. Tempoh belajar “SP” ini hanya dua tahun. Selepas itu, sesuai SKMA No. 72 tahun 1962 dibukalah “FT” yang diresmikan oleh Menteri Agama (Saifuddin Zuhri) pada 15 Desember 1962.<sup>45</sup> Para murid yang sudah menamatkan “SP” diterima langsung di “FT” ini.

Pada tanggal 1962 dibentuk juga Panitia Persiapan Pembangunan Fakultas-fakultas Agama Swasta (P3FAS). Panitia ini kemudian membangun “Fakultas Usuluddin Swasta” (FUS) pada 13 Jun 1962. Dengan pembangunan “FUS” ini, maka sudah ada tiga fakultas agama di “Kopelma Darussalam” sehingga dengan penerangan “FUS” sudah mungkin diresmikan sebuah IAIN yang berotonomi. Untuk keperluan ini, A. Hasjmy mengutus “delegasi” ke Jakarta untuk membicarakan kemungkinan itu dengan Menteri Agama sehingga setahun kemudian diperoleh SK Menteri Agama No.89/1963 tarikh 20 September 1963 mengenai penerangan “FUS”<sup>46</sup> dan SK Menteri Agama No. 90/1963 tanggal 20 September 1963 mengenai peresmian IAIN Ar-Raniry. Pada 5 Oktober 1963 IAIN Ar-Raniry pun diresmikan oleh Saifuddin Zuhri (Menteri Agama) di mana A. Hasjmy (Gubernur Aceh) ditetapkan sebagai pemangku Rektor.<sup>47</sup> Sebagai pemangku Rektor, A. Hasjmy mulai mengusulkan lagi pembangunan fakultas baru di IAIN Ar-Raniry, yaitu “Fakultas Dakwah dan Publisistik” (FDP). Namun, enam bulan kemudian ia dipindahkan ke Jakarta sehingga gagasannya belum menjadi kenyataan.

Ketika A. Hasjmy pulang ke Aceh pada akhir Agustus 1966, ia mengabdikan lagi di “Kopelma Darussalam”. Gagasannya mengenai pembangunan FDP yang sempat tertunda mulai diperjuangkan lagi bersama ISMUHA (Ismail

---

<sup>45</sup> Pada awal perasmian Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry mempunyai empat jabatan, yaitu Jabatan Ilmu Agama, Jabatan Ilmu Pendidikan, Jabatan Bahasa Arab, dan Jabatan Bahasa Inggris. Kini sudah ada delapan jabatan, yaitu Tadris Pendidikan Agama (TPA), Tadris Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika, Kependidikan Islam, Tadris Fisika, Tadris Biologi dan Tadris Kimia. TRBPP S-1 dan D3 IAIN Ar-Raniry, 2004/2005, hlm. 97-123.

<sup>46</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 5/1963, Fakultas Usuludin IAIN Ar-Raniry mempunyai empat jabatan, yaitu; Jabatan Dakwah (Penyiaran), Jabatan Tasawwuf, Jabatan Filsafat, dan Jabatan Perbandingan Agama. Kini, hanya tiga jabatan dengan sedikit perubahan, yaitu; Jabatan Aqidah dan Falsafah (AF), Jabatan Perbandingan Agama (PA), dan Jabatan Tafsir/Hadith. TRBPP S-1 dan D3 IAIN Ar-Raniry, 2004/2005, hlm. 128-132.

<sup>47</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 228-235.

Muhammadsyah), Rektor IAIN Ar-Raniry pada waktu itu. Ketika ISMUHA melobi pihak Departemen Agama di Jakarta, A. Hasjmy sebagai penggagas “FDP” pernah berpesan kepadanya; “Pak ISMUHA tidak boleh pulang ke Aceh, kalau tidak membawa pulang Surat Keputusan Pembangunan Fakultas (Fakultas) Dakwah”.<sup>48</sup> Pesan A. Hasjmy ini menambahkan semangat juang ISMUHA sehingga dengan usahanya diperoleh SK Menteri Agama tarikh 19 Julai 1968, No. 153/1968 mengenai pembangunan “FDP” di lingkungan IAIN Ar-Raniry sebagai “FDP” pertama di Indonesia, di mana A. Hasjmy ditetapkan sebagai dekannya. “FDP” ini yang pada waktu itu mempunyai dua jabatan (Dakwah wa al-Irsyad, dan Publisistik & Journalistik)<sup>49</sup> diresmikan pada 7 Oktober 1968 oleh Menteri Agama, Mohd. Dahlan.<sup>50</sup> Sebagai dekan “FDP”, A. Hasjmy selain membangun “FDP” dari dasar, ia juga terus berupaya untuk meyakinkan pelbagai pihak bahwa “FDP” sangat penting sama ada dalam seminar ataupun rapat kerja. Meskipun pada waktu itu banyak sarjana di lingkungan IAIN lain di Indonesia yang berpendapat bahwa “FDP” tidak perlu, karena “ilmu dakwah” dianggap belum pernah ada, namun pandangan itu dibantah oleh A. Hasjmy dengan hujah yang kukuh. Ia berpendapat bahwa “ilmu dakwah” adalah satu cabang ilmu dalam lingkungan ilmu-ilmu Agama Islam sehingga siapa sahaja boleh memperoleh gelar “doktor” atau “profesor” dalam bidang “Ilmu Dakwah”. Pandangan A. Hasjmy ini disokong oleh Harsja W. Bakhtiar (Guru Besar Fakultas Sastra UI) dengan mengambil contoh mengenai keberadaan *missionary* dalam agama Nasrani sebagai hujah.<sup>51</sup> Upaya A. Hasjmy sebagai Dekan “FDP” selama 10 tahun (1968-1977) di mana ia bekerja tanpa gaji, bukan hanya membuat dirinya diiktiraf oleh kerajaan sebagai “profesor” dalam bidang “ilmu dakwah” dan mampu mencetak alumni “FDP” yang kemudian mereka diterima sebagai pegawai kerajaan dan memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi juga “FDP” IAIN Ar-Raniry mengimplikasikan pembangunan “FDP” lainnya di beberapa IAIN di Indonesia.<sup>52</sup>

Menjelang akhir tugasnya sebagai Dekan “FDP” yang kini sudah diubah namanya menjadi “Fakultas Dakwah” sahaja, pada 5 Februari 1977 A. Hasjmy dipilih sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry. Sebagai Rektor, tugas menjalankan dakwah melalui dunia pendidikan tinggi semakin besar. Kebijaksanaan dakwahnya pun

---

<sup>48</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 673.

<sup>49</sup> Kini, “FDP” yang sudah diubah namanya menjadi *Fakultas Dakwah* sahaja, mempunyai empat jabatan, yaitu; Jabatan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Jabatan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Jabatan Manajemen Dakwah dan Jabatan Pengembangan Masyarakat (TRBPB S-1 dan D3 IAIN Ar-Raniry, 2004/2005, hlm. 48-58).

<sup>50</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 238.

<sup>51</sup> A. Hasjmy, 1979, hlm. 48-47.

<sup>52</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 674.

dibuat sesuai dengan hasil keputusan musyawarah senat IAIN Ar-Raniry yang pertama, yaitu pembinaan disiplin dalam arti luas, pengembangan IAIN Ar-Raniry sesuai tuntutan zaman, menampilkan identitas IAIN Ar-Raniry kepada masyarakat dan melaksanakan kepemimpinan terbuka. Berdasarkan kebijaksanaan ini pada 19-21 March 1977 diadakan lagi musyawarah senat IAIN Ar-Raniry dan berjaya dirumuskan lima pola kerja seperti berikut:

- i. Arah daripada pembinaan IAIN Ar-Raniry, ialah mengembangkan pengetahuan dan pengalaman dalam pengabdian kepada pembangunan masyarakat desa (*ta'mir al-qura'*) sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Indonesia).
- ii. Untuk mencapai maksud tersebut kebijaksanaan komunikasi dua arah (langsung).
- iii. Pembinaan IAIN Ar-Raniry senantiasa didasarkan pada sistem mesyuarat, terbuka, fleksibel dan memperhatikan hak-hak fakultas yang berotonomi.
- iv. Dalam penentuan kebijaksanaan operasional pembinaan, senantiasa diperhatikan kelestarian, kemantapan dan keberlanjutan berdasarkan skala prioritas.
- v. Semua kegiatan berorientasi pada rencana kerja.<sup>53</sup>

Dengan menjalankan empat kebijaksanaan dan lima pola kerja selama lima tahun tersebut bermakna juga A. Hasjmy mulai membangun dan membina IAIN Ar-Raniry ke arah yang lebih maju. Antara aktiviti yang dilakukan A. Hasjmy dalam pengembangan perguruan tinggi khususnya IAIN Ar-Raniry adalah; *Pertama*, sebagai perwujudan dalam pembangunan masyarakat desa, dilakukan penandatanganan "piagam kerjasama" dengan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, pelaksanaan "Seminar Pemantapan Pengertian tentang Desa Pancasila",<sup>54</sup> penyelidikan dan penyuluhan kepada masyarakat desa sama ada dalam bentuk spiritual ataupun sumbangan konseptual, kerjasama dengan pelbagai institusi pemerintahan seperti Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Pengadilan Tinggi Aceh, Kodam Iskandar Muda, BKKBN (Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional), Unsyiah dan lain-lain.

*Kedua*, peningkatan kualitas para pensyarah dengan diberikan kesempatan kepada mereka untuk mengikuti program SPS (Studi Purna Sarjana), PLPA (Pusat

---

<sup>53</sup>Ibid. hlm. 675-676.

<sup>54</sup> "Desa Pancasila" maksudnya adalah kampung yang diciptakan di mana penduduknya mampu mengamalkan makna yang terkandung dalam "Pancasila" sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Latihan Penelitian Agama), PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial), program *Master of Art* (MA) dan program Doktor sama ada di dalam maupun di luar negara serta perwujudan program belajar SPU (Studi Purna Ulama) sebagai sarana pengembangan keilmuan para pensyarah atau calon pensyarah yang masa belajarnya dari 6 bulan dijadikan 10 bulan<sup>55</sup> dan diusahakan perwujudan program MA dalam bidang Hukum Islam di IAIN Ar-Raniry.

*Ketiga*, perwujudan beberapa jabatan baru di IAIN Ar-Raniry seperti Jabatan Tadris Ilmu Sosial (TIS), Jabatan Tadris Ilmu Alam (TIA) dan Jabatan Tadris Administrasi dan Supervisi (TAS) pada Fakultas Tarbiyah; Jabatan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) pada Fakultas Dakwah; Jabatan Ulumul al-Qur'an (UQ) pada Fakultas Usuluddin<sup>56</sup> dan pembaharuan sistem belajar konvensional ke Sistem Kredit Semester (SKS) mulai tahun akademik 1982/1983.

*Keempat*, pembangunan *Biro Ta'mir al-Qura*<sup>57</sup> yang bertugas membangun masyarakat dalam bidang spiritual; membangun pusat *research* (penyelidikan), pusat ilmiah, pusat bahasa, pusat penerbitan dan penyiaran,<sup>58</sup> PSKLH (Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup) sebagai hasil kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan BKKBN<sup>59</sup> serta membuat persiapan pembangunan PSIAT (Pusat Studi Islam Asia Tenggara) sebagai pelaksanaan amanah daripada Seminar Internasional Masuknya Islam di Nusantara<sup>60</sup> dan permohonan sokongan Laksamana TNI Sudomo sehingga Presiden Soeharto sebagai Ketua Yayasan Supersemar berjaya diyakinkan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa IAIN Ar-Raniry.

*Kelima*, pengembangan aktiviti ekstra kurikulum bagi kemajuan mahasiswa dalam bidang sukan, kesenian, tilawah al-Qur'an dan kepanduan (pramuka) dengan melimpahkan tugas ini kepada tiap-tiap fakultas yang ada di IAIN Ar-Raniry sesuai dengan SK Rektor tarikh 30 Jun 1977, No. 9 tahun

---

<sup>55</sup>SPU ini merupakan hasil "Rapat Kerja" (mesyuarat) pimpinan IAIN Ar-Raniry pada 19-22 March 1977 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor No.14 tahun 1978 yang diresmikan oleh Menteri Agama, Alamsyah Ratu Perwiranegara, pada 13 Oktober 1977 (Ramly Maha et al., 1978, hlm. 122).

<sup>56</sup> Kini, Jabatan TIS dan Jabatan TAS pada Fakultas Tarbiyah sudah ditutup. Khusus Jabatan TIA sudah dikembangkan menjadi beberapa jabatan baru, yaitu; Jabatan Biologi, Jabatan Fisika dan Jabatan Kimia. Jabatan UQ pada Fakultas Usuluddin sudah dilebur dalam Jabatan Tafsir/Hadith. Jabatan SKI pada Fakultas Dakwah sudah dipindahkan ke Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry.

<sup>57</sup> Kini, *Biro Ta'mir al-Qura* sudah berubah nama menjadi Pusat Pengabdian Masyarakat (P2M).

<sup>58</sup>A. Hasjmy, IAIN Jami'ah Ar-Raniry. Dlm. Ramly Maha et al., 1978, hlm. 104.

<sup>59</sup> Kini, PSKLH sudah tidak berfungsi lagi.

<sup>60</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 681-683.

1977. Tugas pembinaan mahasiswa dalam bidang sukan dengan segala cabangnya diserahkan kepada Fakultas Syariah. Tugas pembinaan bidang kesenian dengan segala cabangnya diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah. Tugas pembinaan bidang *tilāwah al-Qur'ān* diserahkan kepada Fakultas Ushuluddin dan pembinaan bidang kepanduan diserahkan kepada Fakultas Dakwah.<sup>61</sup>

iii). Pembangunan Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu

Usaha mencerdaskan masyarakat Aceh melalui pembangunan pengajian tinggi seperti Unsyiah dan IAIN Ar-Raniry belum dianggap cukup oleh A. Hasjmy. Sebab, Unsyiah merupakan institusi pengajian tinggi yang cenderung mengikuti sistem sekolah di mana kurikulumnya mengandung lebih banyak “pelajaran umum” berbanding “pelajaran agama”, meskipun “pelajaran umum” itu sendiri pada hakikatnya juga sebagian dari ilmu Agama Islam. Sebaliknya, IAIN Ar-Raniry merupakan institusi pengajian tinggi yang cenderung mengikuti sistem madrasah di mana kurikulumnya mengandung lebih banyak “pelajaran agama” (pelajaran yang tergabung dalam ilmu usuluddin) berbanding “pelajaran umum”. Padahal sebelum “sistem sekolah” atau “sistem madrasah” ditubuhkan, di Aceh sudah berlaku “sistem pendidikan dayah (pesantren)” selama berabad-abad di mana kurikulumnya adalah pelbagai kitab klasik (kitab kuning). Oleh itu, sebagai wujud pengembangan “sistem pendidikan dayah”, maka ditubuhkanlah institusi pengajian tinggi mengikut “sistem pendidikan dayah” di “Kopelma Darussalam” yang dinamakan dengan Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu (DMTCPK).<sup>62</sup>

Pembangunan DMTCPK yang bermatlamat untuk menghasilkan ulama-ulama Islam yang sesuai dengan sebutan *warāsat al-anbiyā'* (pewaris para Nabi), memiliki ilmu pengetahuan Islam dan menjadi teladan bagi seluruh ummat manusia, sudah mulai dirancang pada masa A. Hasjmy bertindak sebagai Gubernur Aceh, di mana pada 17 Maret 1962 dibuat SK No. 38/1962 mengenai susunan Panitia Persiapan Pembangunan DMTCPK yang terdiri dari para tokoh, cendekiawan dan ulama-ulama Aceh. Sebagai Ketua Panitia ditunjuk Kepala Staf Kodam I/Iskandar Muda, Nyak Adam Kamil. Setelah enam tahun lebih, panitia ini bekerja keras untuk melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan, maka pada

---

<sup>61</sup> Ramly Maha et al., 1978, hlm. 118 dan 225.

<sup>62</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 293. *Dayah Manyang Teungku Chik Pante Kulu* maksudnya adalah *Dayah* (Pesantren) Tinggi Teungku Chik Pante Kulu.

31 Agustus 1968 (7 Jumadil Akhir 1388 H) DMTCPK diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 7 Oktober 1968 (15 Rajab 1388 H) Menteri Agama RI, M. Dahlan mengeluarkan “pernyataan restu” terhadap pembangunan DMTCPK sekaligus menetapkan Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba sebagai “Teungku Chik” (guru besar) untuk memimpin DMTCPK. Dengan peresmian ini, maka akhir tahun 1968 DMTCPK mulai melangsungkan kegiatan belajar mengajar mengikut “sistem pendidikan dayah” dengan beberapa ketentuan, yaitu; i. Murid yang diterima adalah murid yang sudah tamat belajar kitab “*Fath al-Mu’in*” atau yang sederajat dengannya di pelbagai *dayah* lainnya; ii. Tempoh belajar lima tahun dengan lima belas macam ilmu;<sup>63</sup> iii. Akan diberikan gelar “ulama” selepas lulus peperiksaan akhir.<sup>64</sup>

Sungguhpun begitu, DMTCPK yang diresmikan oleh Presiden Soeharto dan sudah mendapatkan “pernyataan restu” dari Menteri Agama, namun DMTCPK ditetapkan dalam status swasta, bukan di bawah pentadbiran negara sebagaimana Unsyiah ataupun IAIN Ar-Raniry sehingga pengembangan pun berlaku sangat lambat dan bukan seperti yang diharapkan. Tanggapan masyarakat untuk belajar di DMTCPK pun kurang menggembirakan, karena hampir di seluruh pelosok Aceh sudah ada pelbagai institusi *dayah* di mana kurikulum atau ilmu yang dipelajari melebihi kitab *Fath al-Mu’in*. Tambahan lagi, pada umumnya murid *dayah* kurang menarik minat pada gelar “ulama” yang diberikan secara formal. Sebab gelar “ulama” itu lebih bersifat informal di mana seseorang yang alim dalam bidang ilmu agama dengan sendirinya akan diiktiraf sebagai “ulama” oleh masyarakat Aceh. Oleh itu, menurut Darni Daud hasil diskusi dengan M. Yunus Yacoby pada 19 September 1979, bahwa sejak tahun 1972 kurikulum DMTCPK sudah disamakan dengan kurikulum Fakultas Usuluddin dan pada tahun 1974 kurikulumnya dirubah lagi mengikut kurikulum Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.<sup>65</sup> Dengan perubahan ini, maka alumni DMTCPK sama dengan alumni Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Kini, DMTCPK sudah ditutup. Sebagai gantinya di kompleks DMTCPK dibangun dua Sekolah Tinggi, yang kedua-duanya berstatus swasta, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Teungku Chik Pante Kulu yang terdiri dari dua jabatan; Jabatan Pendidikan Agama dan Jabatan *al-ahwāl al-shakhshiyah*;

---

<sup>63</sup> Setakat ini belum ditemukan catatan mengenai lima belas macam ilmu yang akan diajarkan di DMTCPK, namun dengan memperhatikan kurikulum pendidikan *dayah* yang berkembang di Aceh, maka tampaknya kelima belas macam ilmu tersebut adalah ilmu tauhid, fiqh, usul fiqh, tasawuf, tafsir, hadiith, *nahwu*, *sarf*, *bayān*, *badīʿ*, *maʿani*, *ʿarūd*, *mantiq*, sejarah Islam dan ilmu falak (astronomi).

<sup>64</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 296.

<sup>65</sup> Darmuni Daud, 1980, hlm. 86

dan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan yang terdiri dari tiga jabatan; Jabatan Manajemen Hutan (MH), Jabatan Konservasi Sumber Daya Hutan (KSDH), dan Diploma (D3) Kehutanan.

iv). Pembangunan Akademi Pemerintahan Daerah Negeri

Pada awal pengangkatan A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh, antara cabaran yang dihadapi adalah orang-orang Aceh yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang pemerintahan “modern” sebagaimana yang dikendaki dalam sistem pemerintahan Indonesia sangat sedikit. Hal ini berpunca pada orang-orang Aceh sendiri yang kurang menguasai ilmu pemerintahan “modern” sebagaimana yang dikembangkan oleh pemerintahan Belanda, kecuali hanya beberapa orang sahaja di kalangan Hulubalang yang menguasai ilmu pemerintahan, karena mereka pernah belajar di sekolah Belanda seperti Kweekschool Bukit Tinggi, OSVIA (Opleiding School voor Inlandsche Amstenaren) di Bandung atau Bestuur School di Jakarta. Cabaran semacam ini pada waktu itu bukan hanya terjadi di Aceh tetapi juga di seluruh Indonesia. Oleh itu, A. Hasjmy berupaya membina putra-putri Aceh sehingga mereka mempunyai keahlian dalam bidang pemerintahan. Pembinaan ini dilakukan antaranya dengan pembangunan pendidikan “Kursus Dinas-C” (KD-C)<sup>66</sup> di ‘Kopelma Darussalam” mengikut SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tarikh 10 Oktober 1962, No. Pend. 2/18/29-152.<sup>67</sup>

Pembangunan pendidikan “KD-C” ini disambut gembira oleh masyarakat Aceh. Sebab mahasiswa “KD-C” bukan hanya akan ditempatkan di asrama, pembebasan segala iuran semasa belajar dan berstatus “ikatan dinas,”<sup>68</sup> tetapi juga selepas mereka tamat belajar akan diangkat langsung sebagai pegawai kerajaan. Menimbang pendidikan “KD-

---

<sup>66</sup> A. Hasjmy, Dengan Trikarya-utama. Dlm. T. Alibasjah Talsya, 1963, hlm. 45.

<sup>67</sup> Pendidikan “KD-C” ini dibahagi dalam tiga semester (satu tahun 6 bulan), mengikut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tarikh 23 Oktober 1961, No. Pend. 2/12/15-94. Semester pertama mencakup sembilan matapelajaran yaitu *stadium general*, pengantar ilmu hukum, pengantar tata hukum Indonesia, sosiologi, ilmu negara, hukum Islam, sejarah umum dan politik, hukum adat, Bahasa Inggrs. Semester kedua mencakup sepuluh matapelajaran yaitu ilmu jiwa sosial, hukum tata negara I, ilmu kesehatan dan gizi, ekonomi pembangunan Indonesia, hukum agraria, hukum pidana, hukum tata usaha negara, ekonomi pertanian, Bahasa Inggrs, *study-tour*. Semester ketiga mencakup sembilan matapelajaran yaitu urusan perpajakan, ilmu administrasi, perbendaharaan negara/daerah, urusan kepegawaian, masalah desa dan daerah setingkat, sensus dan statistik, hukum tata negara II, pelajaran mengetik dan steno, latihan kerja (Komisi Redaksi, 1969, hlm. 277-278).

<sup>68</sup>Ikatan Dinas maksudnya adalah “perjanjian untuk bekerja dengan kerajaan apabila tamat belajar” (Teuku Iskandar, 1994, hlm. 306).

C" ini sangat penting bagi kepentingan pegawai pemerintah daerah dan tanggapan masyarakat Aceh pun sangat menggembirakan, maka A. Hasjmy berkeinginan membangun sebuah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) di "Kopelma Darussalam" sebagai sinambung "KD-C". Hal ini sudah disampaikan A. Hasjmy kepada Menteri Dalam Negeri ketika berkunjung ke Aceh bertepatan dengan pelantikan Nyak Adam Kamil sebagai Gubernur Aceh yang baru. Ide A. Hasjmy ini kemudian diwujudkan oleh Nyak Adam Kamil, karena A. Hasjmy dipindahkan ke Jakarta. Atas usaha Nyak Adam Kamil, pada tahun 1965 "KD-C" dihentikan, karena APDN sudah berjaya ditubuhkan di "Kopelma Darussalam" sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri tarikh 15 Mei 1965 No. 12/1965.<sup>69</sup> Pada awal Oktober 1979, lokasi kampus APDN dipindahkan ke Lampineung Banda Aceh<sup>70</sup> dan pada tahun 1995 APDN Banda Aceh sudah ditutup.

Pembangunan "Kopelma Darussalam" selain diisi dengan pembangunan Unsyiah, IAIN Ar-Raniry, DMTCPK dan "KD-C" yang kemudian menjelma menjadi APDN sebagai pewujudan dakwah pada taraf pendidikan tinggi, juga ditubuhkan pendidikan rendah (TK dan SD) dan pendidikan menengah (SMP dan SMA) serta pelbagai sarana penyokong lain, terutamanya yang berhubungkait dengan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan kepada para civitas akademika "Kopelma Darussalam" dan masyarakat pada umumnya seperti menubuhkan sekaligus memimpin "Studi Klub Islam Darussalam" (SKID) dan "Majalah Sinar Darussalam" (MSD). Pembangunan SKID ini merupakan hasil musyawarah para pensyarah dan sarjana Unsyiah, IAIN Ar-Raniry, APDN, ulama dan lain-lain pada 15 Februari 1967 di Wisma I Darussalam. Dengan SKID ini, di mana A. Hasjmy sebagai pimpinannya diharapkan para ulama dan sarjana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutamanya ajaran Islam, dalam arti yang seluas-luasnya melalui kegiatan ceramah ilmiah dan diskusi. Adapun pembangunan MSD dilakukan berdasarkan hasil musyawarah pihak pengurus SKID dengan YPD (Yayasan Pembina Darussalam) pada 17 Juni 1968.<sup>71</sup> Dengan pembangunan MSD ini di mana A. Hasjmy juga ditetapkan sebagai pimpinannya, maka akan memudahkan YPD, SKID, pensyarah dan semua pihak untuk mendakwahkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bukan hanya melalui ceramah ilmiah dan diskusi, tetapi juga melalui karya tulis sehingga memberi manfaat kepada siapa sahaja yang membacanya. Namun, SKID dan MSD kini sudah tidak berfungsi.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 276-277 dan 283.

<sup>70</sup> Darmuni Daud, 1980, hlm. 88.

<sup>71</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 116-119.

<sup>72</sup>SKID dan MSD yang sudah diperjuangkan puluhan tahun yang lepas dan dijadikan sebagai sarana dakwah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan segala

### C. Peran A. Hasjmy dalam Pembangunan “Perkampungan Pelajar” dan “Taman Pelajar”.

Sesuai hasil musyawarah pada 1 Februari 1958 mengenai polisi (*policy*) pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh,<sup>73</sup> A. Hasjmy bukan hanya mengambil peranan secara aktif dalam pembangunan “Kopelma Darussalam” dengan segala kandungannya, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh untuk menyokong pembangunan “Perkampungan Pelajar” (PKP) di setiap Kabupaten dan “Taman Pelajar” (TP) di setiap Kecamatan di Aceh. Di setiap “PKP” akan dibangun Sekolah Dasar (SD), MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTsN (Madrasah Tsanawiyah Negeri), SMA (Sekolah Menengah Atas), MAN (Madrasah Aliyah Negeri), SPG (Sekolah Pendidikan Guru), PGA (Pendidikan Guru Agama) dan sekolah-sekolah atau madrasah lainnya yang setaraf. Bahkan, di “PKP” yang sudah berkembang baik akan diberi peluang untuk ditubuhkan akademi-akademi. Adapun di “TP” akan dibangun SD, MIN, SMP dan MTsN. Bagi “TP” yang sudah berkembang baik dibuka kemungkinan bagi pembangunan SMA, MAN, SPG, PGA atau sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah lainnya yang setingkat.<sup>74</sup>

Upaya A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh untuk mewujudkan idea besar tersebut bukan hanya dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat Aceh supaya menyokong pembangunan pendidikan Aceh secara menyeluruh, tetapi juga dengan meminta sokongan kepada pihak YDKA di bawah pimpinan M. Husein (26 March 1958 hingga 3 September 1960) untuk menubuhkan cawangan YDKA di setiap Kabupaten di Aceh di mana pada tahap awal kepada setiap cawangan YDKA ini diberikan dana penggerak untuk pembangunan pendidikan di daerahnya masing-masing. Selain itu, pembangunan “PKP” dan “TP” juga dibina dan dikembangkan dengan menambah jumlah pembangunan institusi pendidikan dan peningkatan kualitasnya serta menggesa para murid, guru dan masyarakat Aceh dengan beberapa kebijakan berikut;

- i. Pembentukan Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Aceh sesuai SK Gubernur Aceh pada 13 Oktober 1959 No.34/DPD/1959 dan SK 9 September 1960 No. 79/1960 dengan tugas utamanya membangun, membina dan mengurus Sekolah Dasar secara keseluruhan, memajukan kesenian daerah serta

---

dinamikanya selama puluhan tahun, ternyata kini sudah “mati”. Kematian SKID mungkin seiring dengan habisnya masa kerja A. Hasjmy sebagai Rektor IAIN Ar-Raniry pada akhir tahun 1982 manakala MSD dikenal pasti terbit sejak bulan March 1968 dan berakhir hingga tahun 2002.

<sup>73</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 89.

<sup>74</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 540.

- mengumpulkan pelbagai buku sastra Aceh dan pembangunan perpustakaan mengenai kesusasteraan dan kebudayaan Aceh.
- ii. Penetapan 2 September sebagai “Hari Pendidikan Daerah” (Hardikda) Aceh dan merayakannya setiap tahun. Perayaan “Hardikda” ini disertai dengan aneka perlombaan untuk memperebutkan “piala bergilir” Gubernur Aceh pada tingkat Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan “piala bergilir” Bupati di tiap-tiap Kabupaten, menerusi SK. Gubernur Aceh pada 6 Oktober 1960 No. 91/1960.
  - iii. Melakukan kunjungan kerja ke pelbagai sekolah dan madrasah bukan hanya untuk melihat langsung kemajuan yang sudah dicapai, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan suasana mesra antara pemerintah dan dunia pendidikan.
  - iv. Peresmian pembangunan dan penerangan pelbagai institusi pendidikan serta pengistiharan dan pengembangan plan penghapusan buta huruf masyarakat Aceh melalui aktiviti pendidikan.<sup>75</sup>

Dengan pelbagai kebijakan tersebut, A. Hasjmy sebagai Gubernur Aceh berjaya menggesa semangat guru, murid, pemerintah dan terutamanya masyarakat Aceh untuk membangun dan memajukan pendidikan Aceh sehingga dengan sokongan mereka projek besar pembangunan “PKP” dan “TP” menjadi kenyataan. Antara “PKP” yang dikembangkan pada era A. Hasjmy masih bertindak sebagai Gubernur Aceh adalah PKP Babussalam di Aceh Tenggara, PKP Lindung Bulan di Kuala Simpang (kini masuk wilayah Aceh Tamiang), PKP Badrussalam di Bireun, PKP Muda Sedia di Langsa, PKP Tijue di Sigli, PKP Padang Meranti di Aceh Selatan, PKP Meulaboh di Aceh Barat, PKP Ujung Teumatas di Aceh Tengah, PKP Lhok Nga di Aceh Besar, PKP Aceh Utara di Lhokseumawe. Selain beberapa “PKP”, juga mulai dikembangkan pelbagai “TP” di banyak Kecamatan di Aceh.<sup>76</sup>

Jika dilihat kejayaan pembangunan “Kopelma Darussalam” dengan segala apa yang dikandunginya, pembangunan “PKP” dan “TP”, maka semua itu merupakan bukti yang kukuh bahwa A. Hasjmy, tanpa menafikan sokongan pelbagai pihak lainnya, mempunyai peranan penting dalam merubah wajah pendidikan Aceh ke arah yang lebih maju mulai dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi. Hal ini bermakna pula bahwa polisi (*policy*) pembangunan

---

<sup>75</sup> Komisi Redaksi, 1969, hlm. 98-388.

<sup>76</sup> A. Hasjmy, 1985, hlm. 540-541; Komisi Redaksi, 1969, hlm. 98-99 dan 113-114.

pendidikan Aceh secara menyeluruh dan bersepadu sebagai usaha pemulihan kondisi pendidikan Aceh yang rusak boleh dikata berjaya. Oleh itu, dalam pembangunan pendidikan di Aceh A. Hasjmy amatlah besar jasanya sehingga Bupati Aceh Selatan (Cut Mamat) menetapkan A. Hasjmy sebagai “Pahlawan Pendidikan Aceh”.<sup>77</sup>

### C. Penutup

Sebagai salah seorang tokoh pendidikan Aceh, A. Hasmy sudah memainkan peranannya yang begitu penting dalam pembangunan dan memajukan Kopelma Darussalam, Kampung Pelajar dan Taman Pelajar di Aceh. Semua itu merupakan bukti nyata ketokohan dan peranannya dalam bidang pendidikan. Kiprah A. Hasjmy dalam bidang pendidikan dan dalam berbagai bidang lainnya. Karena itu, tidaklah berlebihan ketika Bupati Aceh Selatan menetapkan A. Hasjmy sebagai “Pahlawan Pendidikan Aceh”. Kalaupun penetapan ini dianggap berlebihan, maka tidak dapat dinafikan bahwa sekurang-kurangnya A. Hasjmy adalah salah seorang pemimpin Aceh yang paling berjasa dalam pembangunan pendidikan di Aceh..*Wa Allahu a'lam.*

---

<sup>77</sup>. A.Ghazali, 1978, hlm. 82-83

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ainal Mardhiah Ali, Prof. Ali Hasjmy, bapak untuk semua. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Anon. Memoar, *Tempo*, 26 Januari 1991.
- Ghazaly, A. *Biografi Prof. Tgk. H. Ali Hasjmy*, Jakarta: Socialia, 1978.
- Hasan Basri, Teungku A. Hasjmy: pengembang tradisi keilmuan dan perekat ulama-umara. Dlm. Tim Penulis IAIN Ar-Raniry, *Ensiklopedi ulama Aceh*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.
- Hasjmy.A. "Dengan Trikarya-utama Menuju Masyarakat Sosialis Indonesia". T. Alibasjah Talsya (pnyt.). *Dengan Trikarya-utama menuju Masyarakat Sosialis Indonesia*, Banda Atjeh, Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1963..
- Hasjmy, A. Konsepsi Ideal Darussalam, dalam Komisi Redaksi, *10 Tahun Darussalam dan hari Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Jajasan Darussalam, 1969.
- Hasjmy, A. Peranan Departemen Agama dalam pembinaan manusia pancasila. Dlm. Panitia hari Jadi ke X Jami'ah Ar-Raniry, *10 Tahun IAIN Jami'ah Ar-Raniry*, Banda Aceh: t.p, 1973b.
- Hasjmy, A. *Apa Sebab Rakyat Aceh Sanggup Berperang Puluhan Tahun Melawan Agresi Belanda*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hasjmy, A. *Bunga Rampai Revolusi dari Tanah Aceh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Hasjmy.A. "IAIN Jami'ah Ar-Raniry wujud sebuah cita-cita umat". Ramly Maha et al., *15 tahun IAIN Jami'ah Ar-Raniry*, Banda Aceh, Panitia Hari Jadi ke XV IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1978.
- Hasjmy, A. *Melalui Jalan Raya Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978c.
- Hasjmy. A. *Mengapa Umat Islam Mempertahankan Pendidikan Agama Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Bulan Bintang, 1979.
- Hasjmy. A. 1985. *Semangat Merdeka A. Hasjmy 70 tahun Menempuh Jalan Pergolakan & Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta, Bulan Bintang.
- Marzuki Nyak Man, Suka duka pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Komisi Redaksi. *10 Tahun Darussalam dan hari pendidikan provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh, Jajasan Pembina Darussalam.
- Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- Marzuki Nyak Man, Suka duka pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Komisi Redaksi, 1969
- Marzuki Nyak Man, Pak Hasjmy, pencetus pembangunan Kopelma Darussalam. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.

- Muin Umar, A., Prof. Ali Hasjmy yang kukenang. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Nurdin Abdurrahman, A. Hasjmy salah seorang peletak dasar era modern Aceh Dlm. Badruzzaman Ismail et al., *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.
- Panduan Program S1 dan D3 IAIN Ar-Raniry tahun akademik 2004-2005*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2004/2005
- Soufyan Hamzah, Telah bersatu dengan Masjid Raya Baiturrahman. Dlm. Badruzzaman Ismail et al., *Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia A. Hasjmy Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1994.